

**REAKTIFASI INDONESIA AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT(IA CEPA) TAHUN 2016**

Dedy Rionaldo

Dra. Christy Damayanti. M.Si.

Halifa Haqqi. S.IP. M.Si.

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

This study describes and analyzes the Reactivation of the Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) in 2016. In improving bilateral relations, Indonesia and Australia have agreed to implement strategic economic cooperation negotiations known as the Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA). In the development of cooperation negotiations, it was halted in 2013 due to conditions of fluctuating political relations. Nonetheless, in the end Indonesia and Australia agreed to carry out a reactivation in 2016. The researchers used the theory of bilateral relations and bilateral economic cooperation. This study aims to analyze how the reactivation of the Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2016. The research method used in this study is a qualitative research method with secondary data collection sources. The study was conducted through the collection of documents with descriptive explanation. From research data on the Reactivation of IA-CEPA in 2016, researchers found that although in bilateral relations often experienced fluctuating relationships, basically the two countries have an interest through cooperative relations. Because with the agreement on the re-activation of IA-CEPA cooperation negotiations, it will improve prosperity through economic cooperation so that the economic interests can be achieved through comprehensive cooperative relations.

Keywords:*Reactivation, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Bilateral Economic Cooperation*

A. Latar Belakang

Dalam meningkatkan hubungan bilateral yang harmonis antara Indonesia dan Australia dalam hal ini dilakukan kerjasama-kerjasama antar kedua negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Tindak lanjut dari inisiatif kerjasama ekonomi strategis, kedua negara sepakat untuk melaksanakan sebuah perundingan yang dikenal dengan *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership* (IA-CEPA). IA-CEPA merupakan sebuah kemitraan komprehensif di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi. Kedua negara sebagai mitra strategis secara bersama ingin menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan (Kementerian Perdagangan, 2018 : Hal.1).

Peluncuran IACEPA dilaksanakan pada 2 November 2010 di Jakarta oleh Perdana Menteri Australia dan Presiden Republik Indonesia. Selama pelaksanaan proses perundingan, Indonesia dan Australia telah melaksanakan perundingan sebanyak 12 pertemuan, dimana pertemuan terakhir dilaksanakan pada tanggal 16-21 Juli 2018 di Jakarta (Kementerian Perdagangan, 2018 : Hal.1).

Dalam perkembangan Perundingan IA-CEPA sempat terhenti pada tahun 2013 akibat dinamika politik kedua negara saat itu. Berhentinya perundingan kerjasama ini sangat mempengaruhi proses dalam pelaksanaan perundingan kerjasama kedua negara. Perubahan-perubahan terjadi dalam proses perundingan mengakibatkan lambatnya finalisasi kerjasama ini. Akan tetapi meskipun sempat terhenti, pada 16 Maret 2016, IA-CEPA direaktifasi kembali dan perundingan putaran terakhir IA-CEPA ke-12 dilaksanakan di Jakarta, pada bulan Juli 2018 (Kementerian Perdagangan, 2018).

Dalam penelitian ini berfokus pada proses reaktifasi perundingan kerjasama IA-CEPA. Selama proses perundingan berlangsung, pada saat dihentikan sampai dengan reaktifasi tahun 2016. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana reaktifasi perundingan kerjasama IA-CEPA.

B. Dasar Teori

1. Hubungan Bilateral

Hubungan dalam sebuah pembangunan kerjasama yang terjadi antara dua negara pada prinsipnya tidak lepas dari kepentingan masing-masing

Negara, dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah bagian yang sangat penting mencakup kelangsungan hidup suatu negara bangsa, kemerdekaan, kesatuan wilayah, militer, keamanan dan kesejahteraan (Plano. 1990 Hal : 7).

Pelaksanaan sebuah hubungan bilateral juga sangat berkaitan dengan tercapainya beberapa kesepakatan antara negara yang melakukan hubungan yang mana

2. Kerjasama Ekonomi Bilateral

Melalui kerjasama yang dilakukan dengan adanya persetujuan yang disepakati dan kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan implementasi yang melibatkan pemerintah dan dunia usaha dari negara-negara yang terlibat dalam kerjasama. Dalam perkembangannya berbagai hambatan dan masalah sringkali dihadapi dalam mewujudkan mekanisme kerjasama yang berlandaskan kepada bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. (Dikti, 1997).

Dengan adanya pola seperti itu, maka dibutuhkan sebuah langkah evaluasi serta penilaian secara

mereka menjunjung tinggi pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negeri. Dengan adanya tujuan nasional yang akan dicapai suatu bangsa dapat dilihat dari kepentingan nasional sebuah negara tersebut. Hubungan bilateral merupakan akses dalam melaksanakan hubungan timbal balik antara kedua negara yang terlibat (Perwita dan Yani. 2005. Hal : 28).

behati-hati terhadap kinerja yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya, serta dengan maksimal melakukan upaya penyempurnaan dan perbaikan yang diperlukan agar lebih meningkatkan daya guna dan daya saing bersama dalam kerjasama tersebut.

C. Metode Penelitian

Dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Robert Bogdan dan Steven Taylor, 1992) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Dimana sumber data berasal dari buku, majalah, dokumen serta sarana internet. Objek penelitian dalam tulisan ini adalah menitikberatkan untuk menganalisis reaktifasi IA-CEPA tahun 2016.

D. Pembahasan

1. Sekilas Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia dan Australia.

Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia telah terjalin sudah cukup lama sejak awal kemerdekaan Indonesia, dimana Australia memiliki peran yang penting dalam pengakuan Independensi kedaulatan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 (detikNews, 2016).

Dalam perkembangannya hubungan antara Indonesia dan Australia sering sekali mengalami berbagai permasalahan politik yang terjadi di antara kedua negara sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup berpengaruh dalam hubungan kerjasama akibat dari munculnya sensitifitas politik.

Saat ini kedua negara tengah membahas kerjasama kemitraan

yaitu *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IACEPA)* yang diharapkan akan menjadi acuan utama bagi pengembangan dan perluasan hubungan ekonomi bagi Indonesia dan Australia.

2. Kerjasama Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA).

IA-CEPA merupakan sebuah perjanjian yang komprehensif, yang dibangun atas landasan persetujuan-persetujuan multilateral dan regional yang sudah ada sebelumnya (Kedutaan Besar Australia : Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia IA-CEPA). Kemitraan baru ini diarahkan untuk membentuk sebuah “*economic powerhouse*” (Kementrian Perdagangan, 2019).

IA-CEPA merupakan instrumen bagi Indonesia dan Australia dalam tujuannya mencapai kepentingan ekonomi kedua negara. Adapun manfaat dari kerjasama ini, pertama IACEPA dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing bagi

produk-produk pertanian, perikanan, industri, dan kehutanan dalam perdagangan bilateral yang berkaitan dengan hambatan tarif dan non tarif (Kementerian perdagangan, 2018 : Hal. 4). Prinsip dasar kemitraan IA-CEPA adalah saling menguntungkan (Win-Win) secara berimbang. Kemitraan ini akan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Australia dalam jangka waktu yang panjang (Kementerian perdagangan, 2018 : Hal. 3-4).

IA-CEPA bertujuan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi dan kemitraan yang saling menguntungkan antara kedua negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, negosiasi IA-CEPA akan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dalam *Guiding Principles and Objectives* (Kementerian Perdagangan, 2016 : Hal. 1-3).

3. Perundingan *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA CEPA).

Selama proses perundingan IA-CEPA, Indonesia dan Australia

pada waktu itu sedang dihadapkan dengan konflik dalam hubungan Bilateral. Pada tahun 2013, pemerintah Australia diketahui telah melakukan penyadapan terhadap pemerintah Indonesia yaitu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sejak tahun 2009 (Andreas Gerry Tuwo. 2017).

perundingan IA-CEPA pada tahun 2014 masih belum berjalan.

Permasalahan lain muncul terkait kapal perang Australia yang masuk ke teritori Indonesia dengan membawa para imigran gelap ke perairan Indonesia

Isu kedaulatan dan keamanan Indonesia, termasuk mengenai kapal perang Australia yang enam kali masuk dan membawa imigran gelap ke wilayah perairan Indonesia (Adirini Pujayanti. 2014 : Hal.7). Setelah adanya permasalahan isu kedaulatan dan keamanan terkait kapal perang Australia, pada tahun 2015, pada eksekusi mati *Bali Nine* yang

tertangkap di Bandara Ngurah Rai Bali memunculkan kembali isu baru yang membawa kepada permasalahan baru dalam hubungan Indonesia dan Australia (Indra Liahuw. 2015).

Setelah beberapa kejadian yang mengakibatkan hubungan kedua negara mengalami pasang surut, akhirnya konflik fluktuatif antara Indonesia dan Australia mulai menemui titik terang. Dimana pada saat itu duta besar Australia untuk Indonesia Paul Grison telah kembali ke ibukota Jakarta (BBC. 2015). Sehingga pada tahun 2016 kerjasama perundingan IA-CEPA kembali dilanjutkan oleh Indonesia dan Australia.

4. Kebijakan Indonesia dan Australia tentang Perdagangan dan Investasi dalam Perundingan IA-CEPA.

Dalam IA-CEPA, perjanjian perdagangan bilateral tersebut memberikan kemudahan akses pasar antar kedua negara dengan pembebasan tarif bea masuk menjadi 0%. Di mana komoditas Indonesia ke Negara Kanguru itu

dikenakan 0%, atau artinya sebanyak 6.474 pos tarif telah dieliminasi Australia menjadi 0%. Sedangkan, terdapat 94% komoditas Australia ke Indonesia yang mendapatkan tarif bea 0% (Yohana Arta Uly, 2019). Dalam perjanjian ini akan menghilangkan 100% pos tarif dari Australia (barang Indonesia ke Australia), sedangkan 94% dari pos tarif Indonesia (barang Australia ke Indonesia) akan secara bertahap dihapuskan.

Kebijakan Indonesia dan Australia tentang Non Tarif masih berpegang pada sebuah terapan yaitu struktur kuota tarif. Dalam hal ini larangan dan pembatasan impor ke masing-masing negara dilaksanakan dalam bentuk karantina dan teknis (Kementerian Perdagangan, 2016 : Hal 18-19).

Dalam hal investasi, Pemerintah Australia pada umumnya menyambut baik investasi asing. Karena dengan adanya investasi, sangat berperan dalam mengembangkan ekonomi dan akan memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi

di masa depan(Pemerintah Australia : Australia's foreign investment policy).

Dalam hal investasi, Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai penanaman modal. Dalam UU RI No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pada bab IV pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas dan berada wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan oleh undang-undang lain (Kementerian Keuangan , 2007).

5. Kerjasama Indonesia dan Australia bidang Perdagangan dan Investasi dalam IA-CEPA sampai Reaktifasi tahun 2016.

a. Indonesia dan Australia melaksanakan Perdagangan Dua Arah.

Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 Indonesia berada pada urutan kesembilan dalam pelaksanaan perdagangan dua arah. Pada tahun 2015 hasil total perdagangan dua arah Indonesia dan Australia mencapai 15,046 juta dollar

Australia. Dari hasil pencapaian total perdagangan pada tahun 2015, memperlihatkan bahwa adanya penurunan perdagangan yang terjadi antara kedua negara. Karena tehitung lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2014 dimana hasil total perdagangan Australia dan Indonesia mencapai 15,696 juta dollar Australia (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia. 2014).

Perdagangan dua arah Indonesia dan Australia pada waktu kerjasama IACEPA direaktifasi justru mengalami perubahan.Indonesia justru mengalami penurunan peringkat dimana pada tahun sebelumnya berada pada urutan sembilan menjadi urutan sepuluh pada tahun 2016.Meskipun begitu, jika dilihat dari total perdagangan dua arah Indonesia dan Australia ternyata mengalami peningkatan yang pada tahun 2015 mencapai 15,046 juta dollar Australia meningkat pada tahun 2016 menjadi 15,402 juta dollar Australia(Departemen

Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia. 2017).

b. Indonesia dan Australia melaksanakan Ekspor Barang dan Jasa.

Semenjak kerjasama IA-CEPA mengalami pemberhentian sementara sampai dengan mengalami reaktifasi, dalam bidang ekspor barang dan jasa Indonesia berada pada posisi peringkat kesembilan bagi tujuan ekspor Australia. Adanya penurunan pada tahun 2015, dimana pada tahun sebelumnya nilai ekspor Australia mencapai 6,939 juta dollar Australia menurun menjadi 6,804 juta dollar Australia dan jika diperhatikan total ekspor Australia cenderung stabil di angka 6000 (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia, 2016 : Hal. 33).

Kemudian saat IA-CEPA mengalami reaktifasi, ekspor Australia ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut melebihi total ekspor pada tahun 2014 dimana menjadi tahun perdagangan dua arah

tertinggi Indonesia dan Australia. Peningkatan ekspor tersebut dari 6,939 juta dollar Australia pada tahun 2014 menjadi 7,420 juta dollar Australia pada tahun 2016 (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia, 2016 : Hal. 33).

Nilai Australia melakukan ekspor jasa ke Indonesia adalah 1,243 juta dollar Australia pada tahun 2013, 1,304 juta dollar Australia pada tahun 2014, dan 1,267 juta dollar Australia pada tahun 2015. Untuk pekerja Australia yang berada di Indonesia pada tahun 2014 mencapai total 2.503 orang (IABPG, 2015 dalam *Position Paper on Considerations Towards IACEPA* : Hal.77).

Pada saat IA-CEPA mengalami reaktifasi posisi Indonesia terhadap ekspor jasa Australia pada tahun 2016, Indonesia tetap berada pada posisi peringkat ke sembilan. Peningkatan ekspor juga terjadi sebesar 1,403 juta dollar Australia. Hampir keseluruhan para pekerja yang berasal dari Australia merupakan pekerja profesional (IABPG, 2015

dalam *Position Paper on Considerations Towards IACEPA* : Hal.77).

c. Indonesia dan Australia melaksanakan Impor Barang dan Jasa.

Posisi Indonesia dalam kemitraan perdagangan Australia di kawasan Asia Pasifik berada pada urutan ke delapan. Terlihat adanya penurunan pembelian barang oleh Australia jika dibandingkan dengan tahun 2014. Total impor barang Australia ke Indonesia mencapai 8,757 juta dollar Australia pada tahun 2014 dan 8,242 juta dollar Australia pada tahun 2015 (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia, 2017 : Hal. 80) dan terlihat terjadi penurunan dalam nilai total Impor Australia dari Indonesia meskipun masih dalam kisaran angka 8000.

Pada tahun 2016 IA-CEPA resmi direaktifasi, namun dalam perkembangannya impor Indonesia ke Australia kembali mengalami penurunan impor. Pada tahun 2016, total impor barang dari Indonesia ke

Australia terjadi penurunan menjadi 7,981 juta dollar Australia dimana pada tahun sebelumnya masih berkisar pada angka 8000 (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia, 2016 : Hal. 80). Turunnya impor tersebut diakibatkan oleh adanya penurunan dalam impor produk mesin, emas, tembaga, layar elektronik dan minyak mentah (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia, 2017 : Hal. 96).

Peringkat impor jasa Australia dari Indonesia terjadi penurunan satu peringkat tahun 2015. Akan tetapi total impor jasa justru mengalami kenaikan dari tahun 2013-2015. Total impor jasa Indonesia oleh Australia yaitu 2,481 juta dollar Australia pada tahun 2013, 2,575 juta dollar Australia pada tahun 2014, dan 2,623 juta dollar Australia pada tahun 2015 (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia, 2016).

Pada tahun 2016 saat reaktifasi total impor jasa Australia dari Indonesia adalah sebesar 3,074 juta dollar

Australia yang menyebabkan impor jasa dari Indonesia mengalami peningkatan. Adapun jenis pekerjaan yang menjadi impor jasa bagi Australia seperti pengumpul buah-buahan, staf pada bidang pariwisata, guru bahasa Indonesia, dan perawat (Lembaga Australia Indonesia :Perdagangan dan Kepariwisata).

d. Indonesia dan Australia melaksanakan Investasi

Investasi Australia di Indonesia pada sedang mengalami ketidak stabilan pada tahun 2013-2015. Terlihat bahwa Australia tergolong sedikit dalam melakukan investasi modal di Indonesia pada tahun 2014. Penurunan investasipun terjadi dari 10,867 juta dollar Australia pada tahun 2013 menjadi 8,094 juta dollar Australia pada tahun 2014. Hal ini menyebabkan investasi modal di Indonesia oleh Australia hanya mencapai peringkat ke sebelas diakibatkan adanya penurunan investasi pada tahun 2014 sampai tahun 2015(Departemen Hubungan Luar Negeri dan

Perdagangan Australia, 2016). Pada saat IACEPA direaktifasi, kembali ada peningkatan dalam investasi modal Australia di Indonesia menjadi 9,163 dollar Australia (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia,2016).

Padatahun 2015 Indonesia melakukan investasi modal sebesar 1,403 juta dollar Australia di Australia dan menempatkan Indonesia pada posisi ke sebelas pada peringkat negara kawasan Asia Pasifik yang melakukan investasi penanaman modal di Australia. Pada saat IACEPA direaktifasi pada tahun 2016, perkembangan investasi yang dilakukan Indonesia di Australia terlihat tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pada tahun tersebut terjadi penurunan investasi sebesar 1,233 juta dollar Australia dibanding tahun sebelumnya (Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia,2016).

E. Kesimpulan

Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia sering mengalami ketegangan akibat konflik yang bersifat fluktuatif pada tahun 2013-2015, mengakibatkan pemberhentian sementara perundingan IA-CEPA yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dengan landasan memelihara kepentingan nasional, perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kedua negara sepakat melakukan

reaktifasi perundingan pada tahun 2016.

Sesuai dengan tujuan kerjasama ekonomi bilateral bahwa IA-CEPA akan meningkatkan kesejahteraan melalui kerjasama ekonomi sehingga kepentingan-kepentingan ekonomi Indonesia dan Australia dapat tercapai melalui hubungan kerjasama yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A.A, Perwita., dan Y. M., Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Artha Uly, Yohana. 2019. Kerjasama Perdagangan Indonesia-Australia Bebaskan Tarif Bea Masuk. Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2019/03/04/320/2025511/kerjasama-perdagangan-indonesia-australia-bebaskan-tarif-bea-masuk>

Bogdan, Robert dan Steven Taylor. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.

BBC. 2015. *Dubes Australia Kembali Ke Indonesia*. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150610_indonesia_dubes_australia

Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia. 2014. Komposisi Perdagangan Australia 2013 .

Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia. 2017. Komposisi Perdagangan Australia 2016.

Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia. 2018. Komposisi Perdagangan Australia 2017.

Dikti. 1997 Pengembangan Kerjasama Ekonomi Regional. Diakses dari <http://ebookbrowse.net/perkembangan-hubungan-perdagangan-bilateral-pdf-d77789509>

DetikNews. 2016. Peranan Australia dalam Mengakui Kemerdekaan RI. Diakses dari <https://news.detik.com/abc-australia/d-3276836/peranan-australia-dalam-mengakui-kemerdekaan-ri>

IABPG, 2015. *Position Paper on Considerations Towards IACEPA*.

Kementrian Perdagangan. 2016. Laporan Akhir : Analisis Strategi Posisi Runding Dalam Memperkuat Kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA).

Kementrian Perdagangan. 2016. Siaran Pers : Masuki Putaran Ketiga, IA-CEPA Desain Kerja Sama Ekonomi Lebih Modern.

Kementrian Perdagangan. 2018. IA-CEPA: Momentum Baru Kemitraan Indonesia-Australia.

Kementrian perdagangan. 2018. Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership.

Kementrian Perindustrian. 2019. Analisis Perkembangan Industri : Analisis Tahun 2018 Perkembangan Industri Indonesia.

Kementrian Keuangan. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Diakses dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/25TAHUN2007UU.HTM>

Lembaga Australia Indonesia : Perdagangan dan Kepariwisata. Diakses dari <https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi/australia/bab10/index.html>

Plano, Jack C. 1990. Kamus Hubungan Internasional. Abardin. Bandung

Pujayanti, Adirini. 2014. Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Australia-Indonesia. P3D1 SekJen DPR RI.

Pemerintah Australia : Australia's foreign investment policy. Diakses dari <https://dfat.gov.au/trade/investment/Pages/australias-foreign-investment-policy.aspx>

Tuwo, Andreas Gerry. 2017. *3 Insiden Yang Panaskan Hubungan Indonesia-Australia* Diakses dari <http://global.liputan6.com/read/2819673/3-insiden-yang-panaskan-hubungan-indonesiaaustralia>